

Warga Buang Limbah Tinja ke Kali

Beralasan tak punya septic tank, warga RW 01 Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur, pun membuang limbah tinjanya ke Kali Kinanta yang tak jauh dari permukiman. Kondisi ini rupanya sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Warga hanya membuat pipa paralon yang menghubungkan pembuangan tinja dari rumah mereka menuju kali. Pihak kelurahan pun akhirnya menutup saluran pipa tersebut agar warga tak lagi membuang limbah tinja ke kali.

Salah seorang warga RW 01, Anwar (48) mengatakan, warga tidak membuat septic tank sendiri karena biayanya mahal.

Anwar juga menyadari, pembuangan tinja ke kali itu mencemari lingkungan. Namun menurutnya, kondisi permukiman yang padat penduduk membuat warga lebih praktis jika membuang limbah tinja ke kali.

Tak hanya mencemari lingkungan, pembuangan tinja ke kali ini juga dinilai merusak ketertiban umum. Lurah Pisangan Timur Siti Maryam mengaku telah mengimbau warga untuk membuat septic tank sendiri. [PSP/W-11]

Pertarungan Buaya dan Biawak Juara IAPC 2015

International Animal Photo Competition (IAPC) telah memasuki usianya yang ke-25 tahun ini. Kompetisi fotografi yang telah diselenggarakan sejak 1990 ini juga diadakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia setiap 5 Juni serta Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional pada 5 November.

Menurut Direktur Taman Safari Indonesia, Frans Manangsang, kompetisi tahunan ini selalu mendapat respons positif dari masyarakat.

Tahun ini merupakan tahun kedua IAPC diselenggarakan dengan sistem *online* dan dibagi menjadi 2 kategori: pelajar dan umum. *Event* hasil kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, PT. Datascrip/Canon, Id-Photographer, serta pihak lainnya ini rencananya akan ditutup oleh acara penyerahan hadiah pada Sabtu 7 November mendatang.

Penjurian yang dilakukan Rabu (21/10) di Safari Lodge Hotel, telah memilih total delapan foto sebagai pemenang dari kategori umum dan delapan foto dari kategori pelajar. Salah satu pemenang beruntung tersebut adalah Hendi dengan foto pertarungan Buaya dan Biawak yang menjadi Juara 1 dari Kategori Umum. [161]

Soal Sampah, "Incinerator" Jawabannya

Pekan lalu, mungkin saja babak baru adu pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD Kota Bekasi. Penyebabnya, soal sampah warga DKI yang dibuang ke Bantargebang, Bekasi. Basuki pun berangkat dengan rencana pemanggilan itu.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata, menjelaskan sudah berkali-kali, terjadi pelanggaran yang dilakukan para sopir truk sampah DKI Jakarta saat membuang sampah ke Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mulai dari pelanggaran rute truk yang dilanggar, jam operasional truk hingga volume sampah yang kelebihan kapasitas sampah yang masuk ke tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang. Para sopir dianggap telah melanggar nota kesepahaman (MoU) terkait pembuangan sampah ke Kota Bekasi.

Menurut Basuki, sudah ada perjanjian yang dilakukan antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi terkait sampah.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, pun menegaskan, pihak yang berwenang untuk melakukan evaluasi terkait perjanjian kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta terkait permasalahan TPST Bantargebang adalah eksekutif. Pihak lain seperti DPRD Kota Bekasi (legislatif) hanya melakukan pengawasan terhadap Pemkot Bekasi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

"Secara etika pemerintahan, bagian eksekutif yang berwenang melakukan evaluasi perjanjian kerja sama. Setelah kita berundingan dengan Pemerintah DKI Jakarta, hasilnya akan kita beritahu kepada legislatif Kota Bekasi," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, Senin (26/10).

Untuk itu, sesuai dengan undangan yang dilayangkan Pemprov DKI kepada Pemkot Bekasi, terkait evaluasi perjanjian kerja sama itu, Pemkot Bekasi akan memenuhi undangan tersebut, pada Selasa (27/10) esok di Kantor Gubernur DKI Jakarta.

Dia mengatakan, kesempatan esok akan digunakan untuk membahas beberapa kesepakatan yang tertuang dalam MoU antara



Sampah yang menggunung di TPST Bantargebang.

SP/MIKAEL NIMAN

Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI.

"Ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam pertemuan esok. Kesepakatan dalam MoU yang menurut kaca mata kita, sudah tidak pantas perlu diganti, karena MoU itu dibuat sejak 2009 lalu," ungkapnya.

Kedua pemerintahan itu terikat dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan

diperbolehkan melintas pada pukul 21.00-05.00 WIB. Di luar jadwal tersebut para sopir harus melintas di Jalan Raya Alternatif Cibubur atau Jalan Transyogi.

Pemkot Bekasi mengatakan telah membuat tim yang bertugas untuk memantau isi perjanjian sejak 2009 lalu. Namun, keberadaan tim ini sangat lemah dalam melaksanakan fungsinya.

"Intermediate Treatment Facilities" (ITF) atau Pengolahan Sampah Terpadu di DKI Jakarta

- * Rencana dibangun 2016
- * Dibangun empat ITF, di Marunda dan Cakung-Cilincing (Cacing), Sunter, dan Duri Kosambi.
- * PT Jakarta Propertindo (Jakpro) pelaksana proyek
- * Produksi sampah saat ini, 6.500 ton per hari
- * Dengan ITF, sampah ke Bantargebang hanya 2.000-3.000 ton per hari



Foto: ISTIMEWA

Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi TPST Bantargebang Kota Bekasi.

Sedikitnya, ada tiga poin yang dilanggar Pemerintah DKI yang diatur dalam MoU tersebut. Pertama, terkait rute dan jam operasional perlintasan truk sampah DKI.

Kedua, belum adanya sumur yang dapat memantau kualitas air di sekeliling TPST Bantargebang. Ketiga, volume sampah yang dibuang ke TPST Bantargebang melebihi kapasitas yang ditetapkan.

Pekan lalu, sekitar enam truk sampah DKI dirazia petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi.

Dalam MoU tersebut dijelaskan, truk sampah

ra dengan Rp 58,3 miliar.

Namun, belakangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan uang *tipping fee* yang diberikan pihaknya sekitar Rp 400 miliar per tahun kepada PT GTJ.

Namun, Komisi A DPRD Kota Bekasi membantah, besaran *tipping fee* yang mencapai hingga Rp 400 miliar tersebut. Dikatakan hanya mencapai Rp 340 miliar per tahun yang diberikan Pemprov DKI kepada pengelola PT GTJ.

Terkait hal ini, saat dikonfirmasi Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Dinas Kebersihan Kota Bekasi, Ratim Rukmawan, mengatakan pihaknya hanya mendapat *tipping fee* sebesar Rp 47,6 miliar per tahun.

Hal ini, juga terdapat dalam APBD Kota Bekasi 2015, menyebutkan pendapatan kompensasi pengelolaan TPST Bantargebang Rp 47,6 miliar. "*Tipping fee* yang masuk ke kas daerah Rp 47 miliar dengan rincian Rp 123.000 per ton sampah," kata Ratim.

Dia mengatakan, separuhnya dari dana tersebut diberikan kepada masyarakat di empat kelurahan, yakni Ciketingudik, Cikiwul, Bantargebang dan Sumurbatu. Ada sekitar 13.000 keluarga. Masing-masing keluarga mendapat Rp 200.000 yang diberikan tiap triwulan sekali. "Selebihnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat di sekitar TPST Bantargebang," katanya.

PT GTJ telah ditunjuk oleh kedua pemerintahan, DKI Jakarta dan Pemkot

Bekasi, sebagai pengelola TPST Bantargebang. "Alur pemberian "*tipping fee*", dari Pemerintah Provinsi DKI diberikan kepada pengelola (PT GTJ). Selanjutnya, pengelola memberikan kepada Pemkot Bekasi sebagai kas daerah," ungkapnya.

Pemkot Bekasi tidak berniat mengelola sampah DKI hal dilatari dengan pengelolaan sampah milik Pemkot Bekasi yakni TPA Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang, bersebelahan dengan TPST Bantargebang milik Pemprov DKI, masih belum maksimal.

TPA Sumurbatu yang hanya memiliki luas sekitar 15,8 hektare itu, kini telah dipenuhi sampah warga Kota Bekasi yang mencapai 2 juta meter kubik.

Warga Kota Bekasi sebanyak 2,5 juta jiwa menghasilkan sampah sekitar 1.500 ton per hari. Dari total itu, hanya 600 ton sampah yang dibuang ke TPA Sumurbatu, selebihnya berceceran di jalan atau tidak terangkut truk sampah.

Solusi

Melihat rumitnya permasalahan sampah, Pemprov DKI pun akan membangun *intermediate treatment facilities* (ITF) atau pengolahan sampah terpadu. Di tempat ini, bakal ada *incinerator*, yang merupakan salah satu alat pemusnah sampah yang dilakukan dengan pembakaran pada suhu tinggi, dan secara terpadu dapat aman bagi lingkungan.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama pun langsung menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adji mengatakan, Jakpro akan fokus membangun ITF di kawasan Marunda dan Cakung-Cilincing (Cacing), Jakarta Utara, sedangkan Dinas Kebersihan di Sunter, Jakarta Utara, dan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Rencananya, akan dibangun empat ITF.

"Misalnya sudah terbangun empat ITF, maka asumsi kita buangan sampah ke Bantargebang kisaran 2.000-3.000 ton per hari. Tetapi karena belum terbangun, akhirnya semua sampah kita buang ke Bantargebang, sekarang di kisaran 6.500 ton per hari," katanya.

Masyarakat pun tentu akan menunggu alat ini bekerja. [SP/Mikael Niman]